



REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR DAN KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2024**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Mei 2023

**Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan.**

Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan menjalankan tugas kenegaraan dan amanat konstitusi dalam rangka menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. Masih dalam suasana Bulan Syawal, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin kepada Ibu Ketua dan segenap Pimpinan serta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kami hormati.

Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahan, dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Di tengah berbagai guncangan besar yang melanda perekonomian global, Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan segenap lapisan masyarakat berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap solid, mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat pada masa pandemi, serta terus konsisten melaksanakan berbagai agenda reformasi struktural.

Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan bersama tantangan eksternal yang begitu besar. Hal ini ditandai dengan menurunnya kinerja ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dekade terakhir (2013 - 2022) hanya 3,1%, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2003 - 2012) yang mencapai 4,2%. Tiongkok, yang pada dekade sebelumnya mampu tumbuh *double digit* 10,6%, melambat signifikan menjadi hanya 6,2% selama periode 2013 - 2022. Penyebab perlambatan ini terutama adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai *taper*

tantrum, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi.

Namun, kita bersyukur di tengah guncangan-guncangan besar gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Kerja sama yang sangat baik dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk DPR, otoritas lain, serta seluruh komponen bangsa pada pelaksanaan berbagai program pembangunan telah memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global, bersama Tiongkok dan India. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%, juga jika dibandingkan dengan *emerging economies* anggota G20 lainnya yang tumbuh rata-rata sebesar 3,7%. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Angka pengangguran juga menurun dari sebelumnya 5,94% pada tahun 2014, menjadi 5,18% pada 2019. Sementara itu, tingkat kemiskinan menurun tajam dari 11%, menjadi *single digit* 9,2% pada periode yang sama. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan rasio Gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,414 menjadi 0,380. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Semangat kerja sama yang solid dan sangat baik dari seluruh pihak menjadi modal yang sangat kuat pada saat menghadapi guncangan luar biasa pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020, aktifitas ekonomi di hampir seluruh dunia mengalami kontraksi. Ekonomi Indonesia terkontraksi 2,1%, jauh lebih moderat dibandingkan kontraksi yang terjadi di Filipina (-9,5%), Thailand (-6,2%), Malaysia (-5,5%), dan Singapura (-3,9%). Perekonomian Indonesia juga mampu pulih cepat dan kuat pada tahun 2021, tumbuh 3,7%, dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022, tumbuh 5,3%. Dengan pencapaian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-

19 dengan cepat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia. PDB riil Indonesia tahun 2022 telah mencapai 7,0% di atas level periode prapandemi. Pemulihan ekonomi juga terjadi lebih merata baik dari sisi permintaan maupun produksi. Pada tahun 2022, seluruh sektor perekonomian dapat mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor pariwisata dan penunjangnya yang paling terdampak pandemi pun mampu tumbuh signifikan.

Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 juga telah berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022.

Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata faktor "*luck*". Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat telah efektif dalam membatasi penyebaran virus dan mendorong kembali optimisme masyarakat. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut pada tahun 2022. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis di masa pandemi, terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemi, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perbaikan fondasi ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian nasional dari tekanan eksternal. Perekonomian Indonesia yang tadinya masuk dalam kategori lima negara yang ekonominya rapuh atau "*fragile five*", bersama dengan Brazil, India, Afrika Selatan dan Turki, karena posisi neraca berjalan kita mengalami defisit yang besar pada tahun 2013, kini telah berhasil keluar dari kelompok tersebut. Neraca berjalan menguat signifikan dari sebelumnya defisit 3,2% PDB pada Juni 2013, menjadi

surplus 0,3% PDB pada akhir tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi surplus 1,0% PDB pada Desember 2022 lalu.

Menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi sumber daya alam (SDA). Sejak tahun 2014, Pemerintah mencanangkan kebijakan hilirisasi dengan mewajibkan pembangunan *smelter* secara bertahap bagi perusahaan-perusahaan tambang mineral, dan memberikan berbagai dukungan fiskal, baik melalui perbaikan ekosistem perpajakan maupun dengan memberikan berbagai insentif fiskal terkait. Selain karena faktor harga komoditas yang meningkat tajam, upaya penciptaan nilai tambah tinggi juga berperan penting dalam peningkatan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan. Nilai ekspor Indonesia di tahun 2022 melonjak tajam dan mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah, mencapai USD292 miliar, atau meningkat sekitar 66% dari posisi USD176 miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2022, neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertingginya, mencapai sebesar USD54,5 miliar. Hingga April 2023, neraca perdagangan Indonesia sudah mencatatkan surplus selama 36 bulan secara berturut-turut.

Menguatnya fondasi ekonomi nasional juga tercermin dari stabilnya pasar keuangan domestik di tengah tingginya volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global. Rata-rata depresiasi nilai tukar Rupiah pada tahun 2022 hanya 3,9%, jauh lebih baik dibandingkan Lira Turki (86,4%), Ringgit Malaysia (6,2%), dan bahkan Rupee India (6,4%). Rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah juga stabil pada 7,0% pada tahun 2022, ini bahkan sudah lebih rendah dari posisi prapandemi di tahun 2019, yang mencapai 7,5%. Di tengah gejolak pasar keuangan dunia, pasar saham Indonesia termasuk sebagai salah satu *top performer* di dunia pada tahun 2022.

Dalam kurun waktu yang sama, koordinasi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga telah berhasil menurunkan tekanan inflasi menjadi rata-rata 3,1%, dari sebelumnya rata-rata 6,2% selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014. Efektivitas dan kredibilitas kebijakan pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menurunkan tingkat ekspektasi inflasi nasional. Menurunkan tingkat ekspektasi inflasi ke level yang rendah bukan perkara mudah. Banyak negara, khususnya di Amerika Latin dan Turki, belum berhasil sejak tekanan inflasi global terjadi di akhir

tahun 2021. Dibutuhkan pencapaian-pencapaian yang konsisten secara terus-menerus.

Dalam sepuluh tahun terakhir kita melihat dan merasakan berbagai kemajuan dari hasil pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur vital meningkat signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 Km di tahun 2014, meningkat 1.385 Km menjadi 47.817 Km di tahun 2022. Dalam kurun waktu yang sama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota juga meningkat drastis dari sebelumnya 464.280 Km menjadi 501.344 Km, atau meningkat 37.064 Km. Sementara itu, jalan tol juga mengalami peningkatan tajam, dari sebelumnya 930 Km di tahun 2014 menjadi 2.499 Km di tahun 2022, atau meningkat lebih dari 1.500 kilometer, dengan 1.800 kilometer lainnya sedang dalam tahap pembangunan.

Selanjutnya, infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital untuk sumber pengairan sektor pertanian, pengendalian banjir serta pembangkit listrik, juga meningkat signifikan. Jumlah bendungan yang telah dibangun meningkat dari 15 bendungan di tahun 2014 menjadi 42 bendungan di tahun 2022, dengan kapasitas irigasi yang bertambah signifikan dari 110 ribu hektar di tahun 2014 menjadi 303 ribu hektar di tahun 2022.

Untuk infrastruktur energi, kapasitas pembangkit listrik nasional meningkat lebih dari 20 gigawatt selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2024, Pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mendukung gerak roda perekonomian dan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan program Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pembangunan bendungan dan irigasi akan dilanjutkan.

Di samping pembangunan infrastruktur yang masif, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi agenda prioritas yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah bersama-sama dengan DPR terus berkomitmen untuk menjaga alokasi anggaran yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang merupakan tiga pilar penting pembangunan modal manusia (*human capital development*). Sesuai amanat UU, sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing mendapatkan alokasi minimal 20% dan 5% dari total belanja negara. Pada sektor pendidikan, selain upaya perbaikan infrastruktur pendidikan serta peningkatan kualitas

kurikulum dan tenaga pendidik, Pemerintah juga menyediakan dukungan pendanaan dalam bentuk penyaluran beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah penerima beasiswa LPDP mencapai 35.536 orang, yang tersebar di berbagai universitas ternama baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Selanjutnya, keberhasilan Pemerintah dalam penurunan *stunting* dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022 akan terus diakselerasi untuk mencapai target 14% pada tahun 2024. Begitu juga kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,04% untuk terus turun mencapai 0% pada tahun 2024.

Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting dalam APBN, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. Pengendalian inflasi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah sehingga perekonomian semakin kondusif dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan juga terus dilakukan oleh pemerintah melalui program subsidi bunga dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk UMKM.

Perbaikan regulasi juga terus dikejar. Dalam kesempatan ini, izinkan kami juga untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan para Pimpinan dan Anggota DPR, serta seluruh komponen masyarakat dalam penyusunan sejumlah regulasi yang dimaksudkan bagi perbaikan iklim investasi dan berusaha di Indonesia, khususnya UU Cipta Kerja. Diluncurkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) diharapkan akan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan ekonomi nasional. Reformasi yang sangat fundamental pada sektor keuangan juga berhasil digulirkan melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), guna memperkuat dan memperdalam sistem keuangan nasional sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik. Berakhirnya pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan kita hadapi ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan.

Pertama, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar; menjadi lebih *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Fenomena ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017 ketika AS menerapkan kebijakan untuk mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayahnya (*re-shoring*), yang pada akhirnya memicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sejak saat itu, tensi perang dagang (*trade war*) AS – Tiongkok terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

Perang di Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (*fragmented*) sesuai kedekatan aliansinya (*friendshoring*). Akibatnya, aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat. Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah. Jika tidak

diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia.

Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni AS - Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (*chip war*) yang saat ini didominasi oleh Taiwan.

Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian.

Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Selain ke-empat tantangan besar tersebut, saat ini, perekonomian global di tahun 2023 juga masih dihadapkan pada tekanan yang berat. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat

sehingga *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Kombinasi dari masih ketatnya likuiditas global, terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara, serta persoalan perbankan di AS dan Eropa menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 cenderung lemah. IMF (pada WEO April 2023) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat signifikan ke level 2,8%, dari sebelumnya 3,4% di tahun 2022. Rilis data pertumbuhan PDB triwulan I di beberapa negara utama, khususnya Tiongkok yang hanya tumbuh 4,5% atau masih di bawah proyeksi IMF, meningkatkan pesimisme akan prospek ekonomi global tahun 2023.

Ibu, Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

Dinamika dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks tersebut harus kita waspadai. Melemahnya kinerja ekonomi global berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat kecenderungan melambatnya kinerja ekspor Indonesia, terutama akibat tren moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, khususnya batubara dan CPO.

Di sisi lain, persaingan untuk menarik investor ke dalam negeri juga akan semakin ketat dengan meningkatnya kepedulian terhadap isu lingkungan (*Environment, Social, and Governance, ESG*). Hal ini terutama juga mengingat kondisi pasar keuangan global yang saat ini masih ketat dan penuh ketidakpastian. Prospek pasar keuangan domestik, termasuk pergerakan nilai tukar Rupiah dan *yield* surat berharga pemerintah akan sangat dipengaruhi dinamika pasar global, termasuk meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan. Kesadaran pada isu lingkungan juga telah mendorong kebutuhan akan adanya pasar karbon dan transisi energi ke arah energi terbarukan yang akan berdampak signifikan pada kebijakan investasi pada BUMN energi kita, yakni PLN dan Pertamina.

Selain berbagai tantangan eksternal yang semakin kompleks, kita juga menyadari berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang masih harus kita hadapi, khususnya terkait

ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, serta kualitas kelembagaan dan regulasi yang perlu terus kita perbaiki.

Mempertimbangkan berbagai tantangan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal, serta arah perubahan baru yang tengah terjadi, kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat *"business as usual"*. Upaya mewujudkan cita-cita besar, mengantarkan Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0% per tahun. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural untuk menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi mutlak harus terus dilakukan. Transformasi ekonomi harus menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Faktor bonus demografi yang masih akan kita nikmati hingga pertengahan tahun 2030-an menjadi modal penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami banggakan,

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini (*leading indicators*) lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index nasional bulan April mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: **pertumbuhan ekonomi** 5,3% hingga 5,7%; **inflasi** 1,5% hingga 3,5%; **nilai tukar Rupiah** Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; **tingkat suku bunga SBN 10 Tahun** 6,49% hingga 6,91%; **harga minyak mentah Indonesia** USD75 hingga USD85 per barel; **lifting minyak bumi** 597 ribu

hingga 652 ribu barel per hari dan **lifting gas** 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan,

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.**”

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni; alokasi, distribusi dan stabilisasi. **Fungsi alokasi** terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, **fungsi alokasi** dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.

Selanjutnya, **fungsi stabilisasi** terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, **fungsi distribusi** diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan *stunting*.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNB

dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- 2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
- 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; serta
- 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Sementara itu, dukungan

pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif.

Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. **Pendapatan negara** diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB, sementara **belanja negara** mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. **Keseimbangan primer** terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, **defisit** direncanakan berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB. Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan **rasio utang** dalam batas *manageable* di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut: 1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi; 2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*; 3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan

teknis operasional; 4) memperkuat ketahanan fiskal untukantisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; 5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; 6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta 7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan **tingkat pengangguran terbuka** tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, **angka kemiskinan** diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. **Rasio Gini** diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, **Nilai Tukar Petani (NTP)** dan **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, dalam pembahasan pada Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menekankan kembali bahwa cita-cita besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mensyaratkan ikhtiar dan kerja keras semua pihak. Nasib dan masa depan Indonesia berada di tangan kita semua. Masa depan Indonesia merupakan buah kerja keras kita semua. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Oleh karena itu, kami mengajak Ibu, Bapak Anggota Dewan yang terhormat, untuk bersama-sama merumuskan berbagai langkah strategis, guna mempercepat transformasi dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin. Terima kasih.

**Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.**

**Jakarta, 19 Mei 2023
Atas nama Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,
ttd
Sri Mulyani Indrawati**